

IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DITINJAU DARI SISI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTIM PENGENDALIAN INTERN

Victor Pattiasina¹, Muhamad Yamin Noch²

¹Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua

victor_pattiasina@uniyap.ac.id

²Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua

abienoch12@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI ditinjau dari sisi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistim pengendalian intern pada Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala SKPD dan PPK SKPD pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Jayapura. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 63 responden di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Jayapura. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan survei langsung. Pengujian hipotesis diuji secara empiris menggunakan *Multiple Regression*.

Hasil penelitian menunjukkan Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) dan Sistim Pengendalian Intern (SPI) secara parsial maupun simultan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI di Kota Jayapura. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika SDM, PTI dan SPI meningkat, maka peningkatan tersebut akan diikuti oleh peningkatan implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan SDM, PTI dan SPI akan meningkatkan implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI di Kota Jayapura.

Kata Kunci: SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, SPI Pemerintah dan Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI,

1. PENDAHULUAN

Perubahan perlakuan akuntansi Pemerintah menuju basis akruaI akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Penelitian Priyono di Kabupaten Sampang menyatakan bahwa banyak kendala yang ditemukan dalam upaya implementasi penerapan laporan keuangan berbasis akruaI [1]. Pertanyaannya adalah siap dan tidak siapkah pemerintah daerah mengimplementasikan SAP berbasis akruaI ini? Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi implementasi penerapan sistem akuntansi berbasis akruaI, diantaranya yaitu sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern [2].

Sumberdaya manusia merupakan salah satu elemen penting dalam implementasi sistem akuntansi berbasis akruaI. Problema yang dihadapi entitas pemerintahan terkait aspek sumberdaya manusia antara lain rendahnya keterampilan staf, lemahnya pengalaman relevan, kurangnya fasilitas pendukung,

lemahnya kepemimpinan (*leadership*) dan lemahnya pola 'penalti' [3]. Hal yang paling baru muncul adalah terkait ketersediaan sumber daya manusia yang handal di pemerintah daerah. Sumberdaya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara.

Sukses tidaknya adopsi akuntansi (berbasis) akruaI dan perubahan sistem terkait, tidak mungkin tercipta tanpa adanya dukungan sumberdaya manusia yang memadai. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi [4]. Kompetensi yang dimaksud dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, frekuensi pelatihan-pelatihan dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Faktor selanjutnya yang berpotensi mempengaruhi implementasi penerapan SAP berbasis akruaI di pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini

menjadi penting karena adanya fenomena peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks di pemerintahan yang seharusnya diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah [5]. Untuk itu maka pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah tersebut kepada publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Banyak manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* [6], namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal.

Kendala implementasi penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap implementasi penerapan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual.

Selanjutnya yang juga turut berpotensi mempengaruhi implementasi penerapan SAP berbasis akrual di pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern. Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi [7].

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu; (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. fungsi pertama dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi dan dinamakan pengendalian intern akuntansi, sedangkan fungsi kedua dan ketiga dilakukan secara khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan dinamakan pengendalian intern administrative [8].

Pentingnya sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern untuk mendukung implementasi penerapan SAP berbasis akrual di pemerintah daerah kemudian didukung secara ilmiah melalui kajian-kajian empiris. Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi secara bersama-sama memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah [6]. Hasil kajian di Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan menyatakan bahwa kapasitas SDM dan pemanfaatan informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah [9].

Kajian empiris lainnya menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial maupun simultan [10]. Faktor lainnya yang juga sangat berpengaruh adalah: (a) SDM, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kesiapan implementasi penerapan SAP berbasis akrual. (b) SDM dan komitmen organisasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kesiapan implementasi penerapan SAP berbasis akrual. (c) Teknologi informasi dan komunikasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesiapan implementasi penerapan SAP berbasis akrual [11].

Hasil penelitian mengenai identifikasi faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan Pemda

Nias Selatan dalam implementasi sistem akuntansi basis akrual yaitu; komunikasi, kompetensi SDM, struktur birokrasi, komitmen pimpinan dan resistensi terhadap perubahan [12]. Ke 5 faktor tersebut kemudian berhasil direduksi melalui analisis faktor hingga menjadi hanya 3 faktor yakni informasi, perilaku dan keterampilan. Hasil kajian empiris lainnya menunjukkan bahwa tingkat implementasi penerapan akuntansi akrual dipengaruhi secara signifikan oleh pelatihan staf keuangan [13]. Namun, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat pendidikan staf, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman, latar belakang pendidikan pimpinan dan ukuran satuan kerja terhadap tingkat implementasi penerapan akuntansi akrual. Kajian empiris terakhir yang menjadi acuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa faktor sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah [14].

Perbedaan hasil kajian tersebut dapat dikategorikan sebagai celah penelitian (*research gap*) yang adalah celah atau kesenjangan penelitian yang dapat dimasuki oleh peneliti berdasarkan pengalaman atau temuan dari peneliti terdahulu (kajian empiris) [15]. Dari ketiga faktor yang telah diulas dibagian sebelumnya (sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistim pengendalian intern) terlihat bahwa ketiga faktor tersebut ternyata ada yang berpengaruh tetapi ada juga yang tidak berpengaruh terhadap implementasi penerapan SAP berbasis akuntansi di pemerintah daerah atau yang oleh Agusty disebut sebagai *research gap*. Kontradiksi, perbedaan atau *research gap* hasil kajian-kajian empiris di atas selanjutnya akan dikembangkan peneliti sebagai masalah dalam penelitian.

Selanjutnya peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di Kota Jayapura. Lokasi ini dipilih karena beberapa alasan, pertama mengacu pada opini *disclaimer* pada tahun 2007 dan 2010 serta opini tidak wajar pada tahun 2011 pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura adalah karena lemahnya sistim pengendalian intern [16]. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi penerapan akuntansi berbasis akrual belum optimal. Kedua, karena realita yang menunjukkan bahwa ketersediaan SDM yang

berkompeten untuk mendukung implementasi penerapan SAP berbasis akrual relatif masih minim. Berangkat dari pemaparan fenomena, konsep dan keterkaitan hubungan antar variabel serta *research gap* melalui kajian-kajian empiris diatas, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap implementasi penerapan SAP berbasis akuntansi di Kota Jayapura.

1.1. Akuntansi Berbasis Akrual

Basis akuntansi akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP (2006), kemudian di revisi lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang kemudian direvisi lagi dengan Permendagri 64 tahun 2014 tentang akuntansi keuangan berbasis akrual. Dimana dijelaskan bahwa basis akuntansi akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selanjutnya, dalam makalah yang sama, KSAP menyatakan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan [17]. Dari pemaparan pengertian akuntansi basis akrual dapat disimpulkan bahwa akuntansi basis akrual merupakan basis akuntansi dimana hak dan kewajiban atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya diakui pada saat terjadinya peristiwa, tanpa melihat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selain itu, basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas antara lain tujuan manajerial dan pengawasan.

2.2 Implementasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Implementasi penerapan basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintahan suatu negara bukanlah suatu hal yang mudah. *Asian Development Bank* secara khusus menyoroti

masalah implementasi penerapan basis akrual bagi negara berkembang memberikan tujuh rekomendasi implementasi penerapan basis akrual bagi negara berkembang, yaitu;

- 2.2.1. Kehati-hatian dalam memilih strategi implementasi penerapan basis akrual.
- 2.2.2. Komitmen politik merupakan salah satu kunci penting.
- 2.2.3. Tujuan yang ingin dicapai harus dikomunikasikan.
- 2.2.4. Perlunya tenaga akuntan yang andal.
- 2.2.5. Sistem informasi akuntansi harus memadai.
- 2.2.6. Badan *audit* tertinggi harus memiliki sumber daya yang tepat.
- 2.2.7. Implementasi penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

Implementasi penerapan basis akrual dapat dilakukan secara *top-down* atau *bottom-up*. Bila diterapkan secara *top-down*, biasanya implementasi penerapan basis akrual dilakukan secara *mandatory* (wajib) untuk semua entitas dalam rentang waktu (*time frame*) yang pasti dan seragam [18]. Sedangkan bila diterapkan secara *bottom-up*, harus dilakukan *pilot project* terlebih dahulu pada entitas tertentu, untuk meyakinkan bahwa basis akrual dapat dilaksanakan dengan baik. Implementasi penerapan secara *bottom-up* dapat dilakukan dalam *time frame* pendek, maupun *time frame medium*. Implementasi penerapan akuntansi akrual dalam *time frame* pendek (katakanlah 1-3 tahun) akan beresiko timbulnya *reform fatigue* yaitu hilangnya *sense of urgent* dan antusiasme dari para penyelenggara akuntansi khususnya karena merasa lelah dengan perubahan-perubahan yang terus-menerus tanpa merasakan manfaatnya secara langsung. Untuk mengatasi resiko itu disarankan agar implementasi penerapan basis akrual dilakukan secara bertahap dalam *time frame medium* ($\pm 4-6$ tahun). Implementasi penerapan ini dapat dilakukan dengan cara terapkan dulu kepada beberapa entitas akuntansi tertentu di pemerintah pusat yang sudah dianggap mapan dalam proses akuntansinya, sebagai *pilot project*; kemudian apabila *pilot project* sudah berhasil, maka pengalaman praktek akuntansi akrual ini dapat ditransfer dan digunakan untuk bahan sosialisasi ke instansi pemerintah lainnya.

2.3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien [19]. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut [20]. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan [21].

Terjadinya perubahan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah bukan hanya berdampak terhadap basis akuntansi yang digunakan maupun struktur APBD, akan tetapi juga berdampak terhadap teknis operasional penatausahaan keuangan pemerintah daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi, laporan serta pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai.

2.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan [2]. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi

informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan.

Perkembangan teknologi informasi, terutama pada era reformasi berdampak signifikan terhadap sistem informasi akuntansi (SIA) dalam suatu perusahaan/organisasi. Dampak yang dirasakan secara nyata adalah pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem komputer [2]. Dalam Penjelasan Permendagri No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja [22].

2.5. Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi (*internal accounting control*) dan pengendalian intern administratif (*internal administrative control*).

Banyak penulis yang mengemukakan komponen atau unsur-unsur pokok yang termasuk dalam pengendalian intern akuntansi. Sub komponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah [23];

- 1) Perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-catatan bernomor.
- 2) Pemisahan tugas.
- 3) Otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi.
- 4) Pemeriksaan independen atas kinerja.

- 5) Penilaian yang sesuai/tepat atas jumlah yang dicatat.

Unsur-unsur pokok yang diperlukan dalam menciptakan pengendalian akuntansi yang efektif antara lain [6];

- 1) Adanya perlindungan fisik terhadap harta.
- 2) Pemisahan fungsi organisasi yaitu pemisahan fungsi organisasi yang saling berkaitan.
- 3) Adanya jejak audit yang baik.
- 4) Sumber daya manusia yang optimal.

Komponen penting yang terkait dengan pengendalian intern akuntansi antara lain sebagai berikut [7];

- 1) Sistem dan prosedur akuntansi: Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi (pasal 98 PP Nomor 58 tahun 2005);
 - a) Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas.
 - b) Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas.
 - c) Sistem dan prosedur akuntansi asset.
 - d) Sistem dan prosedur akuntansi selain kas.
- 2) Otorisasi: Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran.
- 3) Formulir, dokumen, dan catatan: Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.
- 4) Pemisahan tugas: Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi dalam suatu transaksi harus dipisahkan secara jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.

2.6. Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.6.1. Pengaruh Sumberdaya Manusia Terhadap Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua.

Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi secara bersama-sama memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah [6]. Hasil kajian di Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan

menyatakan bahwa kapasitas SDM dan pemanfaatan informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah [9]. Kajian empiris lainnya menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial maupun simultan [10]. Selanjutnya dinyatakan bahwa (a) SDM, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kesiapan implementasi penerapan SAP berbasis akrual. (b) SDM dan komitmen organisasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kesiapan implementasi penerapan SAP berbasis akrual. (c) Teknologi informasi dan komunikasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesiapan implementasi penerapan SAP berbasis akrual [11]. Berdasarkan konsep dan kajian penelitian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut;

H₁: SDM berpengaruh positif terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual pada Kota Jayapura.

2.6.2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Terhadap Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual.

Identifikasi faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan kesiapan Pemda Nias Selatan dalam implementasi sistem akuntansi basis akrual yaitu; komunikasi, kompetensi SDM, struktur birokrasi, komitmen pimpinan dan resistensi terhadap perubahan [12]. Ke 5 faktor tersebut kemudian berhasil direduksi melalui analisis faktor hingga menjadi faktor informasi, perilaku dan keterampilan. Tingkat implementasi penerapan akuntansi akrual dipengaruhi secara signifikan oleh pelatihan staf keuangan. Namun, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat pendidikan staf, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman, latar belakang pendidikan pimpinan dan ukuran satuan kerja terhadap tingkat implementasi penerapan akuntansi akrual [13].

Berdasarkan pemaparan hasil kajian-kajian tersebut diatas maka hipotesis penelitian yang diajukan untuk diuji selanjutnya antara lain;
H₂: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual pada Kota Jayapura.

2.6.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual.

Kajian empiris terakhir yang menjadi acuan dalam penelitian ini [14] menyatakan bahwa faktor sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pemaparan hasil kajian diatas maka hipotesis penelitian yang diajukan untuk diuji selanjutnya antara lain;

H₃: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual pada Kota Jayapura.

3. METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian maka jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan (*explanatory*) dimana penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dan pengaruhnya dengan pengujian hipotesis. Pendekatan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Model penelitian ini adalah model penelitian survei dengan menggunakan *instrument* kuesioner. Populasi dalam kajian inia adalah seluruh pegawai bagian keuangan pada OPD yang ada di Kota Jayapura, sementara teknik penarikan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan teknik ini maka yang menjadi sampel akhir dari kajian ini sebanyak 63 pegawai OPD di Kota Jayapura. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang SDM

Persepsi responden terhadap SDM dengan menggunakan teknik pengukuran angka indeks rata-rata terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Sumberdaya Manusia

Item	Frekuensi Jawaban							Rata-rata
	5	4	3	2	1	Total	%	
X _{1.1}	11	37	8	4	3	63	100	3.78
X _{1.2}	9	38	15	-	1	63	100	3.86
X _{1.3}	35	22	5	-	1	63	100	4.43
X _{1.4}	8	45	9	-	1	63	100	3.94
X _{1.5}	12	41	7	2	1	63	100	3.97
X _{1.6}	14	37	8	2	1	63	100	3.97
X _{1.7}	17	35	9	1	1	63	100	4.05
X _{1.8}	12	40	10	-	1	63	100	3.98
Rata-rata SDM ;							3.99	

Sumber Data Di Olah (2018)

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai mean (nilai rata-rata) persepsi tentang SDM adalah sebesar 3.99. Hal ini berarti bahwa responden relatif setuju dengan seluruh pernyataan tentang SDM. Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang relatif lebih baik dalam menjelaskan variabel ini adalah item X_{1,3} yang menyatakan bahwa; uraian tugas subbagian keuangan/akuntansi anda sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya (mean atau nilai rata-ratanya sebesar 4.43).

4.2. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)

Persepsi responden terhadap PTI yang teraktualisasi dalam 9 pernyataan dengan menggunakan teknik pengukuran angka indeks rata-rata terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang PTI

Item	Frekuensi Jawaban							Rata-rata
	5	4	3	2	1	Total		
	F	F	F	F	F	F	%	
X _{2,1}	19	34	6	2	2	63	100	4.05
X _{2,2}	20	34	5	2	2	63	100	4.08
X _{2,3}	13	37	10	2	1	63	100	3.94
X _{2,4}	10	37	15	-	1	63	100	3.87
X _{2,5}	4	44	13	1	1	63	100	3.78
X _{2,6}	15	37	9	1	1	63	100	4.02
X _{2,7}	9	46	8	-	1	63	100	3.98
X _{2,8}	16	38	8	-	1	63	100	4.08
X _{2,9}	10	46	6	-	1	63	100	4.02
Rata-rata PTI ;								3.98

Sumber Data Di Olah (2018)

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai mean (nilai rata-rata) persepsi tentang PTI adalah sebesar 3.98 yang berarti bahwa responden relatif setuju dengan seluruh pernyataan tentang PTI atau secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa PTI dipersepsikan mampu mempengaruhi persiapan implementasi penerapan akuntansi berbasis akrual di Kota Jayapura. Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang relatif lebih baik dalam menjelaskan variabel ini adalah item X_{2,2} dan X_{2,8} dengan atau nilai rata-rata masing-masing item sebesar 4.08.

4.3. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Persepsi responden terhadap SPI dengan menggunakan teknik pengukuran angka indeks rata-rata terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang SPI

Item	Frekuensi Jawaban							Rata-rata
	5	4	3	2	1	Total		
	F	F	F	F	F	F	%	
X _{3,1}	7	39	15	1	1	63	100	3.79
X _{3,2}	7	38	17	-	1	63	100	3.79
X _{3,3}	10	38	14	-	1	63	100	3.89
X _{3,4}	9	34	18	1	1	63	100	3.78
X _{3,5}	14	38	10	-	1	63	100	4.02
X _{3,6}	18	37	7	-	1	63	100	4.13
X _{3,7}	18	38	6	-	1	63	100	4.14
Rata-rata SPI ;								3.93

Sumber Data Di Olah (2018)

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai mean (nilai rata-rata) persepsi tentang SPI adalah sebesar 3.93. Hal ini berarti bahwa responden relatif sangat setuju dengan seluruh pernyataan tentang SPI. Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang relatif lebih baik dalam menjelaskan variabel ini adalah item X_{3,7} dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 4.14.

4.4. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Implementasi akuntansi berbasis akrual

Persepsi responden terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan teknik pengukuran angka indeks rata-rata terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

Item	Frekuensi Jawaban							Rata-rata
	5	4	3	2	1	Total		
	F	F	F	F	F	F	%	
Y _{1,1}	16	33	13	-	1	63	100	4.00
Y _{1,2}	25	31	5	2	-	63	100	4.25
Y _{1,3}	10	45	6	-	2	63	100	3.97
Y _{1,4}	22	34	5	2	-	63	100	4.21
Y _{1,5}	20	37	6	-	-	63	100	4.22
Y _{1,6}	17	40	4	1	1	63	100	4.13
Y _{1,7}	9	40	12	2	-	63	100	3.89
Y _{1,8}	14	39	9	1	-	63	100	4.05
Y _{1,9}	18	34	10	-	1	63	100	4.08
Y _{1,10}	18	37	7	-	1	63	100	4.13
Y _{1,11}	18	39	5	-	1	63	100	4.17
Rata-rata Implementasi akuntansi berbasis akrual ;								4.10

Sumber Data Di Olah (2018)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai mean (nilai rata-rata) persepsi tentang Implementasi akuntansi berbasis akrual sebesar 4.10. Hal ini berarti bahwa responden relatif sangat setuju dengan seluruh pernyataan tentang Implementasi akuntansi berbasis akrual di Kota Jayapura. Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang relatif lebih baik dalam menjelaskan

variabel ini adalah item Y_{1.2} dengan nilai rata-rata sebesar 4.25.

4.5. Uji Kualitas Instrumen Penelitian

4.5.1. Uji Validitas

Pengujian validitas dalam kajian ini menggunakan korelasi *Product Moment Person*, dimana valid atau tidaknya instrumen dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi *Product Moment Person* dengan signifikan 5%. Hasil pengujian validitas terlihat dibawah ini.

Tabel 5.
Uji Validitas

Variabel	Item	R	Sig	Ket
SDM (X ₁)	X _{1.1}	0.713	0.000	Valid
	X _{1.2}	0.600	0.000	Valid
	X _{1.3}	0.666	0.000	Valid
	X _{1.4}	0.667	0.000	Valid
	X _{1.5}	0.785	0.000	Valid
	X _{1.6}	0.735	0.000	Valid
	X _{1.7}	0.852	0.000	Valid
PTI (X ₂)	X _{2.1}	0.696	0.000	Valid
	X _{2.2}	0.731	0.000	Valid
	X _{2.3}	0.721	0.000	Valid
	X _{2.4}	0.732	0.000	Valid
	X _{2.5}	0.761	0.000	Valid
	X _{2.6}	0.761	0.000	Valid
	X _{2.7}	0.746	0.000	Valid
SPI (X ₃)	X _{3.1}	0.846	0.000	Valid
	X _{3.2}	0.772	0.000	Valid
	X _{3.3}	0.784	0.000	Valid
	X _{3.4}	0.876	0.000	Valid
	X _{3.5}	0.855	0.000	Valid
	X _{3.6}	0.800	0.000	Valid
	X _{3.7}	0.803	0.000	Valid
Implementasi akuntansi berbasis akrual (Y)	X _{3.8}	0.827	0.000	Valid
	X _{3.9}	0.801	0.000	Valid
	X _{3.10}	0.722	0.000	Valid
	Y _{1.1}	0.644	0.000	Valid
	Y _{1.2}	0.660	0.000	Valid
	Y _{1.3}	0.702	0.000	Valid
	Y _{1.4}	0.742	0.000	Valid
	Y _{1.5}	0.733	0.000	Valid
	Y _{1.6}	0.800	0.000	Valid
	Y _{1.7}	0.643	0.000	Valid
	Y _{1.8}	0.655	0.000	Valid
Y _{1.9}	0.768	0.000	Valid	
Y _{1.10}	0.756	0.000	Valid	
Y _{1.11}	0.756	0.000	Valid	

Sumber Data Di Olah (2018)

Hasil dari pengujian validitas diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel penelitian ini dapat dikatakan valid karena tingkat signifikannya lebih kecil dari 0.05.

4.5.2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas kajian ini menggunakan *alpha cronbachs* dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai koefisien keandalan lebih besar atau sama dengan 0.6 artinya apabila $\alpha = 0.6$ maka instrumen dapat dikatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas terlihat pada tabel berikut ini;

Tabel 6
Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
SDM	0.861	Reliabel
PTI	0.904	Reliabel
SPI	0.914	Reliabel
Implementasi akuntansi berbasis akrual	0.903	Reliabel

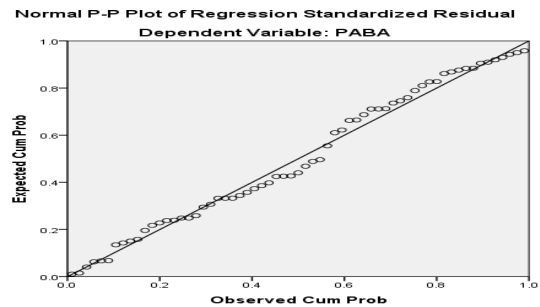
Sumber Data Di Olah (2018)

Seluruh variabel terteliti dalam kajian ini ternyata memiliki koefisien korelasi diatas 0.60 sehingga seluruh data penelitian ini dapat dikatakan realibel yang artinya data ini layak untuk dilanjutkan pada pengolahan data tahapan selanjutnya.

4.6. Uji Asumsi Klasik

4.6.1. Uji Normalitas

Pengujian normal tidaknya dostribusi data penelitian ini dilakukan dengan melihat penyebaran data pada *normal probability plot*. Tampilan hasil pengujian *normal probability plot* data penelitian ini terlihat dibawah ini.

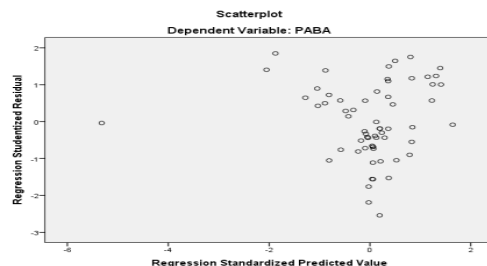


Gambar 1. Hasil Pengujian Normalitas

Berdasarkan *normal probability plot* pada gambar 1, maka data penelitian ini dapat dikatakan telah memenuhi kaidah normalitas karena terlihat bahwa data menyebar mengikuti garis diagonal, penyebarannya secara acak dan tidak membentuk pola tertentu.

4.6.2. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat gambar *charts scatterplot*.



Gambar 2. Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Gambar 2. menunjukkan bahwa data penelitian bebas heterokedastisitas karena titik-titik data menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

4.6.3. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas kajian ini menggunakan melihat nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) atau faktor pertambahan ragam. Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinieritas, sebaliknya apabila VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Berikut ini adalah hasil Pengujian multikolinieritas seperti yang terlihat dibawah ini;

Tabel 7.
Pengujian Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
SDM	0.130	7.709
PTI	0.125	7.969
SPI	0.136	7.367

Sumber Data Di Olah (2018)

Data tabel 7. menunjukkan bahwa nilai *tolerance* mendekati 1 dan nilai VIF berada dibawah 10 yang berarti tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.

4.6.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti untuk mengetahui pengaruh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil analisis regresi berganda yang terlihat dibawah ini.

Tabel 8.
Analisis Regresi Berganda

Variabel	Coefficients	t hitung	Sig	Keterangan
Constant	7.682			
SDM	0.399	2.488	.016	Signifikan
PTI	0.407	2.894	.005	Signifikan
SPI	0.366	2.178	.033	Signifikan
<i>Adjusted R Square</i>	0.869			
F	138.282		0.000	signifikan
F tabel	2.76			
t tabel	1.998			

Sumber Data Di Olah (2018)

Tabel 8. menunjukkan nilai konstanta sebesar 7.682 mengartikan mengartikan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari SDM, PTI dan SPI maka besarnya adalah nilai variabel Implementasi akuntansi berbasis akrual adalah sebesar 7.682. Koefisien SDM = 0.399 menunjukkan bahwa setiap nilai SDM meningkat atau semakin baik maka nilai

Implementasi akuntansi berbasis akrual akan meningkat sebesar nilai koefisien regresi tersebut atau dengan kata lain setiap peningkatan Implementasi akuntansi berbasis akrual dibutuhkan nilai SDM sebesar 0.399 dengan asumsi besarnya nilai PTI dan SPI adalah tetap. Koefisien regresi PTI = 0.407 menunjukkan bahwa setiap nilai PTI meningkat atau semakin baik maka nilai Implementasi akuntansi berbasis akrual akan meningkat sebesar nilai koefisien regresi tersebut atau dengan kata lain setiap peningkatan Implementasi akuntansi berbasis akrual dibutuhkan nilai PTI sebesar 0.407 dengan asumsi besarnya nilai SDM dan SPI adalah tetap atau konstant. Koefisien regresi terakhir SPI = 0.366 menunjukkan bahwa setiap nilai SPI meningkat atau semakin baik maka nilai Implementasi akuntansi berbasis akrual akan meningkat sebesar nilai koefisien regresi tersebut atau dengan kata lain setiap peningkatan Implementasi akuntansi berbasis akrual dibutuhkan nilai SPI sebesar 0.366 dengan asumsi besarnya nilai SDM dan PTI adalah tidak berubah.

Data diatas juga menunjukkan bahwa model konseptual penelitian yang dibangun adalah layak karena terbukti bahwa Implementasi akuntansi berbasis akrual di Kota Jayapura mampu dijelaskan dengan baik oleh Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dengan nilai determinasi yang dapat digolongkan baik yakni sebesar 0.869 atau 86.9% sementara 13.1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

4.6.5. Pembahasan Hasil Penelitian

Variabel prediktor pertama dalam kajian ini adalah SDM yang terukur melalui 8 item pernyataan. Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa SDM pegawai yang menjalankan fungsi akuntansi pada 23 SKPD di Kota Jayapura terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual. Hal ini dibuktikan oleh koefisien regresi yang menunjukkan jika SDM meningkat, maka peningkatan tersebut akan diikuti oleh peningkatan implementasi akuntansi berbasis akrual. Hasil ini didukung oleh hasil analisis deskriptif yang mengungkapkan bahwa nilai rata-rata persepsi responden tentang SDM adalah sebesar 3.99 yang berarti responden relatif setuju dengan seluruh pernyataan tentang SDM atau secara tidak langsung dapat

dikatakan bahwa SDM dipersepsikan dapat mempengaruhi implementasi akuntansi berbasis akrual di Kota Jayapura.

Hal ini artinya bahwa pemerintah Kota Jayapura relatif responsif atau dapat dikatakan bahwa perubahan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pelaporan keuangan pemerintah daerah khususnya PABA ternyata mampu diantisipasi oleh pemerintah Kota Jayapura. Kemampuan ini terjadi karena sumber daya manusia, terutama pegawai yang menjalankan fungsi akuntansi ternyata telah dipersiapkan untuk mendukung pengelolaan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dengan memahami perubahan basis akuntansi dari kas modifikasian ke basis akrual. Temuan ini sejalan dengan pendapat Winindyaningrum dan Rahmawati, yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah dibutuhkan pegawai dengan pengetahuan yang cukup dalam bekerja, sehingga tidak akan menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga [24]. Senada dengan pendapat diatas, Simanjuntak (2010) mengatakan bahwa salah satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi penerapan SAP berbasis akrual adalah tersedianya SDM yang kompeten dan andal di bidang akuntansi.

Variabel prediktor berikutnya adalah PTI yang dalam kajian ini terwakili oleh 9 item pernyataan Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa PTI berpengaruh signifikan terhadap PABA di Kota Jayapura. Hal ini dapat dilihat melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika PTI meningkat maka peningkatannya akan diikuti oleh peningkatan implementasi akuntansi berbasis akrual. Bukti lain yang mendukung temuan ini adalah pada hasil analisis deskriptif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai mean (nilai rata-rata) persepsi tentang PTI adalah sebesar 3.98 yang berarti bahwa responden relatif sangat setuju dengan seluruh pernyataan tentang PTI atau secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa PTI dipersepsikan mampu mempengaruhi implementasi akuntansi berbasis akrual di Kota Jayapura.

Faktor mendasar yang memicu berpengaruhnya PTI terhadap PABA Provinsi Papua, bahwa karena adanya fenomena peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks di pemerintahan yang seharusnya

diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah, diantaranya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Untuk itu maka pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah tersebut kepada public dalam upaya transparansi keuangan daerah [5].

Tentunya akan banyak keuntungan melalui pemanfaatan teknologi informasi ini, antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyediaan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* [6]. Hal ini tentunya akan sangat berdampak pada kesiapan pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Implementasi penerapan akuntansi berbasis akrual. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Adventana [11] dan Kusuma [13].

Variabel terakhir adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terjabarkan pada 7 pernyataan. Hasil analisis inferensial melalui regresi berganda menunjukkan bahwa SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual di Kabupaten Pegunungan Bintang. Temuan ini dibuktikan oleh koefisien regresi yang menunjukkan jika SPI meningkat, maka peningkatan tersebut akan diikuti oleh peningkatan implementasi akuntansi berbasis akrual. Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian internal oleh pemerintah Kota Jayapura berpotensi mampu mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual. Hasil ini mendukung hasil penelitian terdahulu [10] yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial maupun simultan.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara parsial maupun simultan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Implementasi implementasi penerapan akuntansi berbasis akrual di Kota Jayapura. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika SDM, PTI dan SPI meningkat, maka peningkatan tersebut akan diikuti oleh peningkatan Implementasi akuntansi berbasis

akrual. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan SDM, PTI dan SPI akan meningkatkan Implementasi akuntansi berbasis akrual di Kota Jayapura.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan beberapa temuan hasil kajian ini adalah sebagai berikut;

- 5.2.1. Dalam upaya untuk mendukung persiapan Implementasi akuntansi berbasis akrual, maka sebaiknya Pemerintah Kota Jayapura mensosialisasikannya kepada seluruh pimpinan SKPD dan pegawai yang terlibat dalam tugas pengelolaan keuangan daerah.
- 5.2.2. Pemerintah Kota Jayapura harus melakukan perekrutan atau penerimaan pegawai dengan mempertimbangkan tingkat dan latar belakang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan lingkup tugas pengelolaan keuangan daerah.
- 5.2.3. Pemerintah Kota Jayapura harus tetap memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai proses penyusunan laporan keuangan dengan sistem akuntansi basis akrual kepada pegawai dalam tugas pengelolaan keuangan daerah untuk mengantisipasi perubahan ketentuan atau peraturan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. Priyono, *Keandalan Informasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual (Kajian Pengelolaan Asset Tetap daerah Kabupaten Sampang)*. BPK Papua, 2010.
- [2] Desmiyawati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Pemda Riau)," *J. Akunt.*, vol. 2, no. 2, 2014.
- [3] H. P. Harun, H. dan Kamase, "Accounting Change and Institutional Capacity: The Case of Provincial in Indonesia," (<http://ksap.org/memorandum>), 2012. .
- [4] A. Tuasikal, "Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit SKPD (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Maluku)," 2006.
- [5] Sugijanto, "Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999," *Lintasan Ekon.*, vol. XIX, no. 1, pp. 50–66, 2002.
- [6] Desi Indriasari dan Ertambang, "Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pendendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)," Pontianak, 2007.
- [7] Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. UPP STIM YKPN, 2007.
- [8] I. & R. Triyuwono, "Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas pada Lazis (Studi Kasus di Lazis X Jakarta)," *J. Ris. Akunt. Indones.*, vol. 3, no. 2, pp. 151–167, 2000.
- [9] W. Andriani, "Pengaruh Kapasitas SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan)," *J. Akunt. Manaj.*, vol. 5, no. 1, 2010.
- [10] D. N. Christianti, "Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Penelitian Mandiri," Prodi Akuntansi FE Universitas Komputer Indonesia, 2012.
- [11] G. A. Adventana, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi DIY dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Menurut PP. No. 71 tahun 2010," *Ringkasan Has. Penelitian, Univ. Atma Jaya*, 2013.
- [12] H. Herlina, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010 (Studi empiris; Kabupaten Nias Selatan)," Universitas Negeri Padang, 2013.
- [13] M. I. Y. Kusuma, "Analisis Faktor-

- Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Implementasi penerapan Akuntansi AkruaI pada Pemerintah,” Universitas Diponegoro, 2013.
- [14] E. S. dan S. P. Sari, “engaruh Pelaporan Keuangan pemerintah Daerah ditinjau dari SDM, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Akuntansi,” *Semin. Nas. dan Call Pap. Progr. Stud. Akuntansi-FEB UMS*, 2014.
- [15] F. Agusty, “No Title,” in *Metode Penelitian Manajemen; Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi Ilmu Manajemen*, Edisi ke2., Semarang: BPFE Universitas Diponegoro, 2006.
- [16] P. Uropmabin, “Analsis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Laporan Keuangan Beropini Disclimer (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang),” Universitas Cendrawasih, 2013.
- [17] M. . Halim, Abdul dan Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi ke4. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- [18] A. Faradillah, “Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010),” Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia, 2013.
- [19] N. Hullah, A. R., S. Pangemanan, S. Tangkuman dan Budiarmo, “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintahan Sulawesi Utara,” *J. Ris. Akunt.*, vol. 3, no. 2, pp. 9–21, 2012.
- [20] R. S. dan A. A. F. Alimbudiono, “Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah ‘XYZ’ dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik,” *J. Akunt. dan Keuang. Sekt. Publik*, vol. 5, no. 2, pp. 18–30, 2004.
- [21] G. A. Hevesi, “Standards for Internal Control in New York State Government,” 2005. .
- [22] S. dan R. Mustafa, Santiadji, “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari,” Universitas Haluoleo,Kendari, 2011.
- [23] & B. W.-O.-W. Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*, Fourth Edi. John Wiley and Sons. Inc, 2000.
- [24] A. N. Rahmawati, “Analisis Faktor Kebijakan Hutang yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2006-2010,” 2012.